

ARAB SPRING DI YORDANIA 2011-2013 : DARI DEMONSTRASI PUBLIK MENUJU REFORMASI POLITIK

Ahmad Zainal Mustofa

Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui fenomena Arab Spring yang terjadi di Yordania. Dalam tulisan ini, penulis mendeskripsikan tiga hal yang menjadi substansi dalam penelitian, yaitu kemunculan Arab Spring di Yordania, kemudian kondisi ekonomi, dan reformasi politik. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik deskriptif. Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Arab Spring yang terjadi di Yordania berupa gelombang protes massa yang pada awalnya menuntut perbaikan sisi ekonomi. Kondisi ekonomi di Yordania memang sedang tidak stabil. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya pengangguran dan naiknya angka kemiskinan serta adanya perilaku koruptif para elit pemerintah. Menyikapi hal tersebut, Raja Abdullah memberikan terobosan baru berupa reformasi politik dengan membentuk badan hukum dan mengamandemen undang-undang bagi pemilih di Yordania. Pendekatan ini efektif meredam gelombang demonstrasi, karena Yordania melakukan pendekatan yang berbeda dengan negara lain seperti Tunisia dan Mesir. Yordania mengutamakan pendekatan yang lebih humanis. Meskipun terdapat kontroversi dan perbedaan pandangan dengan kelompok oposisi seperti Front Aksi Islam, Ikhwanul Muslimin, Hirak, dan lainnya, namun Yordania berhasil terhindar dari kejatuhan kekuasaan.

Kata Kunci: Arab Spring, Demonstrasi Publik, Reformasi Politik, Yordania

Abstract: This paper aims to investigate the Arab Spring phenomenon that occurred in Jordan. In this paper, the author describes three things that become the substance of the research. in the research, namely the emergence of the Arab Spring in Jordan, then the economic conditions, and political reforms. economic conditions, and political reforms. The method used in this research is qualitative with descriptive techniques. After the research, it can be concluded that concluded that the Arab Spring that occurred in Jordan was in the form of a wave of mass protests that initially demanded economic improvements. protests that initially demanded improvements in the economic side. Economic conditions in Jordan is indeed unstable. This is characterized by the large number of unemployment unemployment and rising poverty rates as well as the corrupt behavior of government elites. government elites. In response to this, King Abdullah provided a new breakthrough in the form of political reform by forming a legal entity and amending the law for voters in Jordan. political reform by forming a legal entity and amending the law for voters in Jordan. This approach was effective in reducing the wave of demonstrations, because Jordan took a different approach from other

countries such as Tunisia and Egypt. such as Tunisia and Egypt. Jordan prioritizes a more humanist approach. Although there were controversies and differences of views with opposition groups such as the Islamic Action Front, the Brotherhood of such as the Islamic Action Front, the Muslim Brotherhood, Hirak, and others, Jordan managed to avoid the fall of power. managed to avoid the fall of power.

Keywords: Arab Spring, Public Demonstrations, Political Reform, Jordan

Article History: *Received 29 March 2024, Revised: 30 April 2024, Accepted: 05 May 2024, Available online 01 July 2024*

PENDAHULUAN

Musim Semi Arab yang terjadi pada tahun 2010 silam merupakan fenomena keruntuhan kekuasaan yang melanda kawasan Timur Tengah. Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan keragaman politik intra-regional. Dimulai di Tunisia, Arab Spring menyebar ke sebagian besar negara Arab dengan demonstrasi politik yang tingkat intensitasnya bervariasi. Demonstrasi tersebut terjadi di berbagai kota besar dan kecil. Namun, perubahan politik yang dihasilkan berbeda. Turbulensi yang terjadi disebagian negara Arab tersebut memiliki perbedaan di antara sistem politik Timur Tengah.¹ Gejolak Arab Spring juga menunjukkan kepada pemerintah otokratis bahwa jutaan orang yang tinggal di negaranegara Islam percaya pada kebebasan berekspresi dan pemerintahan yang demokratis.²

Fenomena yang melanda kawasan Timur Tengah tersebut dipuji secara luas sebagai pemberontakan melawan kediktatoran. Otoritarianisme ini juga memiliki dimensi militer baik dalam target protes maupun peran angkatan bersenjata dalam memfasilitasi atau menghalangi perubahan rezim. Semua rezim yang ditentang memiliki latar belakang militer seperti Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali, mantan perwira angkatan udara. Kemudian Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh yang merupakan seorang

¹ Martin Beck, and Simone Huser, "Jordan and the 'Arab Spring': No Challenge, No Change?" *Middle East Critique* 24, no. 1 (2015): 83.

² Erin Blakemore, What was the Arab Spring and how did it spread? n.d. <https://www.nationalgeographic.com/culture/article/arab-spring-cause>.

perwira militer yang menjadi gubernur militer dan selanjutnya menjadi presiden. Presiden Mesir, Hosni Mubarak, juga merupakan salah satu pemimpin berlatar belakang militer. Sebelumnya, Hosni merupakan komandan angkatan udara negara dan seorang pilot pesawat tempur terlatih. Kemudian di Libya ada Kolonel Muammar Gaddafi yang menjadi presiden. Berikutnya, Presiden Suriah, Bashar al-Assad.³

Demonstrasi di Arab dan Afrika ini umumnya terjadi dalam skala kecil. Pengunjuk rasa pada dasarnya menuntut reformasi bukan revolusi. Namun, generalisasi ini menyembunyikan realitas yang jauh lebih kompleks. Tingkat kerusuhan dan reaksi masing-masing rezim sangat berbeda di delapan negara monarki dunia Arab yang meliputi Bahrain, Yordania, Kuwait, Maroko, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).⁴

Fenomena Arab Spring juga melanda Yordania. Isu-isu seperti kesepakatan gas Yordania-Israel, hutan Save Berqesh dan pembangkit anti-nuklir di Yordania digunakan untuk memobilisasi massa. Para pengunjuk rasa terdiri dari aktivis Pemuda Tepi Timur (Hirak) dan para demonstran yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Hirak terdiri dari pemuda yang menjadi pegiat media sosial yang memiliki beragam ideologi politik, mencari perubahan ekonomi dan politik di Yordania.⁵

Yordania tidak mengalami pemberontakan nasional anti-rezim pada tahun 2011 seperti di Tunisia dan Mesir. Namun Yordania mengalami mobilisasi massa dalam bentuk demonstrasi pro-reformasi. Gerakan-gerakan dan aktor-aktor baru muncul dari gelombang regional ini sebagai bagian dari meningkatnya konfigurasi protes dan keluhan di Yordania. Hal ini terus menimbulkan tantangan besar bagi sistem politik Yordania.⁶ Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Arab

³ Florence Gaub, "After The Spring: Reforming Arab Armies," *Strategic Studies Institute, US Army War College*, (2014): 1.

⁴ Zoltan Barany, "The "Arab Spring" in the Kingdoms," *Arab Center for Research & Policy Studies*, (2012): 1.

⁵ Lakshmi Priya, "Jordan and the Arab Uprisings: Rezim Survival and Politics Beyond the State," *Strategic Analysis*, (2019): 2

⁶ Curtis Ryan, "Resurgent Protests Confront New and Old Red Lines in Jordan," *Middle East Report* 292, no. 3 (2019).

Spring di Yordania dan bagaimana pemerintah menyikapi fenomena tersebut.

METODE

Sebagai acuan terkait dengan masalah penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini merupakan penelitian kualitatif yang berjenis kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah suatu metode dalam dunia akademis yang digunakan untuk melakukan penelitian yang orientasinya berupa fenomena yang bersifat alami. Pada umumnya penelitian kualitatif memiliki prosedur dalam pelaksanaan penelitian. Hal ini dimaksudkan supaya menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau tulisan dari hasil observasi. Adapun pendekatan dalam penelitian kualitatif cenderung ditujukan pada latar dan individu secara holistik. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, yaitu memaparkan semua data-data yang telah terkumpul dan kemudian dianalisis.⁷ Penulis kemudian akan mengumpulkan terlebih dahulu data-data yang relevan dengan pembahasan Arab Spring di Yordania melalui berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, artikel berita hingga dokumen pendukung lainnya. Semua data yang telah terkumpul akan disaring secara objektif agar dapat menghasilkan akurasi data yang ideal dan proporsional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ARAB SPRING DI YORDANIA

Pada 14 Januari 2011, warga Yordania melakukan gelombang protes terhadap pemerintah. Adanya gelombang protes yang meluas di negara-negara Arab membuat warga Yordania mengambil bagian dalam demonstrasi di negaranya. Demonstrasi ini pertama muncul di kota-kota seperti Dhiban, Tafilah, Ma'an, dan Al-Karak, sebelum pindah ke Amman. Secara umum, mereka menghindari retorika anti-rezim dengan sengaja tidak melanggar batas kritik langsung terhadap monarki. Namun sebaliknya, mereka menuntut perubahan politik dan ekonomi. Komposisi protes ini sangat beragam, mulai dari kelompok Islamis dan kelompok

⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 79.

oposisi tradisional sayap kiri hingga pensiunan tentara di angkatan bersenjata dan Hirak.⁸

Transformasi politik dalam gelombang protes pada tahun 2011 ini juga bersifat mendadak. Pergeseran tatanan sosial masyarakat benar-benar mengejutkan tidak hanya di kawasan Arab melainkan di dunia. Revolusi ini, bagaimanapun, didahului oleh gerakan protes populer di beberapa negara Arab, ibu kota, dan objek vital lainnya. Kondisi represi, ketidakadilan, despotisme, dan korupsi, telah menjadi pertanda mendekatnya revolusi di negara-negara Arab lainnya. Semua orang dikejutkan oleh ledakan kaum muda dan jutaan orang yang turun ke jalan untuk menyerukan runtuhnya rezim di negaranya. Karakteristik yang paling menonjol dari Musim Semi Arab berdasarkan fakta bahwa mereka adalah transformasi yang didorong oleh kaum muda. Karakter muda revolusi ini patut mendapat beberapa komentar, karena tanpa partisipasi pemuda momentum revolusioner yang mengambil alih tanah Arab tidak dapat dimulai dan bertahan.⁹ Sepanjang tahun 2011, demonstrasi di Bahrain dan Iran telah ditanggapi dengan kekerasan, sementara Maroko, Yordania, Djibouti, Irak, Oman, dan Aljazair semuanya melaporkan protes. Musim Semi Arab menegaskan pentingnya perubahan revolusioner di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA).¹⁰

Protes besar pertama di Yordania terjadi pada 2011, ketika hampir 10.000 orang berbaris di kota-kota di seluruh negeri. Pada 14 Januari tersebut adalah hari yang sama presiden Tunisia melarikan diri dari jabatannya dan sebelum protes massal dimulai di Mesir. Selama dua tahun berikutnya, protes hari Jumat menjadi hal biasa dalam kehidupan di Yordania. Sekitar 6.000 demonstrasi terjadi di negara tersebut antara Januari 2011 dan pertengahan tahun 2014. Pada tahun 2011 dan 2012, ada lebih dari 800 aksi buruh yang terdokumentasi. Protes ini pada awalnya fokus terhadap permasalahan ekonomi seperti membalikkan pemotongan

⁸ Karim Merhej, "The Never-Ending Process of Political Reform in Jordan," 4 Mei 2022. <https://timep.org/2022/05/04/the-never-ending-process-of-political-reform-in-jordan/>.

⁹ Abdulkhaleq Abdullah, "Repercussions of the Arab Spring on GCC States," Arab Center for Research & Policy Studies, 2012: 3.

¹⁰ Graeme P. Herd, "The Arab Spring: Challenges, Obstacles and Dilemmas," *Connections* 10, no. 4 (2011): 103.

subsidi, meningkatkan upah layanan publik, memerangi korupsi, dan yang lainnya. Namun warga kemudian beralih ke tuntutan politik begitu partai politik terlibat terutama Front Aksi Islam (IAF) dan Ikhwanul Muslimin. Secara luas, tuntutan politik terkonsentrasi pada peningkatan kekuatan legislatif vis-à-vis eksekutif, memberhentikan anggota pemerintah tertentu, mengubah konstitusi, dan, yang paling penting, mengubah undang-undang pemilu yang tidak berimbang. Pada periode pasca2011, aktivis oposisi di Yordania biasanya dipecah menjadi tiga kelompok yaitu kelompok Islamis, tradisional, dan kelompok pemuda. Kelompok-kelompok ini bekerja sama dalam berbagai tingkatan, tetapi Ikhwanul Muslimin, menjadi organisasi politik yang terbesar di negara itu.¹¹

Bertentangan dengan persepsi umum, Yordania mengalami peningkatan protes politik yang signifikan sebagai bagian dari pemberontakan Arab. Front Aksi Islam aktif dalam hal ini bersama dengan partai politik, asosiasi profesional, aktivis independen, dan gerakan pemuda suku yang dikenal sebagai Hirak. Raja Abdullah II menanggapi dengan menjanjikan reformasi, membubarkan kabinet, dan menunjuk perdana menteri baru. Dia mengambil beberapa langkah yang tidak biasa, seperti mencabut undang-undang yang mengharuskan pengunjuk rasa mendapatkan izin terlebih dahulu. Ia juga menyerukan pemilihan parlemen baru, yang diadakan pada bulan Januari 2013.¹²

Sebelum terjadinya pemberontakan di Arab, banyak sektor perekonomian yang mengalami pengorganisasian buruh secara aktif. Pada tahun 2009 saja, terjadi pemogokan besar-besaran yang dilakukan oleh para pekerja di Perusahaan Fosfat Yordania dan di Pelabuhan Aqaba. Pada tahun berikutnya, tercatat 140 protes buruh baik di sektor publik maupun swasta yang mencakup beberapa sektor ekonomi seperti transportasi, industri, pertanian, pendidikan, konstruksi, dan garmen, dan masih banyak lagi. Namun, gelombang protes yang terjadi di seluruh wilayah menjadi kejutan bagi para elit politik Yordania.¹³

¹¹ Marty Harris, "Jordan's youth after the Arab Spring," *Lowy Institute for International Policy*, (2015): 3.

¹² Jillian Schwedler, Jordan: The Quiescent Opposition, n.d. <https://www.wilsoncenter.org/article/jordan-thequiescent-opposition>

¹³ Karim Merhej, The Never-Ending Process.

Fenomena Arab Spring yang melanda Yordania merupakan peristiwa yang tabu di wilayah tersebut. Hal inilah yang kemudian memberikan efek kejut kepada elit pemerintahan karena minimnya persiapan untuk mengantisipasi gelombang protes yang terjadi. Demonstrasi massa yang menuntut beberapa aspek mulai dari ekonomi hingga pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh elit pemerintah. Namun aksi protes tersebut pada akhirnya merambat pada sektor politik yang meminta pemerintah untuk melakukan reformasi.

KONDISI PEREKONOMIAN DI YORDANIA

Musim Semi Yordania dimulai pada awal 2011 dengan keluhan ekonomi, perjuangan melawan kemiskinan, pengangguran, dan korupsi menjadi tema inti. Secara resmi, tingkat pengangguran adalah 11,4 %, sementara perkiraan tidak resmi menunjukkan mendekati 22%. Demonstrasi publik tidak hanya didorong oleh motif ekonomi, namun tujuan utamanya ialah gagasan bahwa perubahan ekonomi hanya akan dicapai dengan perubahan politik. Hal tersebut menjadi inti dalam menyatukan dan memotivasi pengunjuk rasa sejak permulaan pemberontakan Arab.¹⁴

Protes dimulai pada bulan Januari 2011, dengan orang-orang menyerukan lebih banyak lapangan kerja dan diakhirinya perilaku koruptif pemerintah. Mereka segera menuntut adanya kebijakan demokrasi yang lebih besar dan kekuasaan raja dikurangi. Demonstrasi tersebut sebagian besar berlangsung damai, meskipun terjadi bentrokan mematikan dengan pasukan keamanan pada bulan November 2012. Bentrokan tersebut terjadi ketika ribuan orang turun ke jalan untuk menunjukkan kemarahan mereka terhadap penghapusan subsidi bahan bakar oleh pemerintah. Langkah tersebut diminta oleh International Monetary Fund (IMF) sebagai imbalan atas pinjaman untuk menyelamatkan perekonomian Yordania yang dibebani hutang.¹⁵

¹⁴ Nur Koprulu, "Consolidated monarchies in the post-‘Arab Spring’ era: the case of Jordan," *Israel Affairs* 20, no. 3 (2014): 319.

¹⁵ [bbc.com., Arab uprising: Country by country – Jordan, n.d. https://www.bbc.com/news/world-12482679.](https://www.bbc.com/news/world-12482679)

Gerakan protes domestik Yordania mencakup sumber oposisi pemerintah seperti partai politik kiri, serta gerakan Islamis yang jauh lebih besar yang berakar pada Ikhwanul Muslimin dan partai politik afiliasinya. Namun protes juga mendapat kekuatan dari sumber-sumber oposisi baru, termasuk gerakan populer berbasis pemuda (al-Hirak). Protes tersebut sebagian besar berbasis dari komunitas-komunitas Yordania “Tepi Timur” yang secara historis menjadi benteng dukungan rezim. Protes-protes ini berkisar dari tujuan politik seperti reformasi, demokratisasi yang lebih besar hingga tujuan ekonomi. Sektor ekonomi cenderung memasukkan oposisi terhadap kebijakan ekonomi neoliberal yang dikhawatirkan akan menimbulkan penurunan komitmen negara terhadap subsidi, lapangan kerja sektor publik dan kesejahteraan sosial. Yordania mengalami kendala ekonomi yang rumit, defisit anggaran yang besar, dan langkah-langkah penghematan ekonomi sesuai dengan IMF. Yordania mungkin tidak mengalami revolusi selama Musim Semi Arab 2011- 2013, tetapi terjadi ketidakstabilan politik dalam bentuk lima perdana menteri yang berbeda dan enam pemerintahan yang berbeda dalam rentang waktu tersebut.¹⁶

Situasi ekonomi yang sulit tentu meresahkan warga Yordania. Sebuah survei yang dilakukan oleh “Center for Strategic Studies” di Amman pada tahun 2009 menemukan bahwa mayoritas penduduk Yordania menginginkan pemerintah bertindak lebih agresif untuk meningkatkan perekonomian. Pada tahun 1990-an, Raja Hussein memulai serangkaian reformasi ekonomi sebagai tanggapan atas pengangguran yang meningkat setelah pengusiran warga Yordania dari Teluk. Reformasi ini yang meliputi privatisasi, liberalisasi, dan pengurangan subsidi ternyata tidak berhasil. Inflasi meningkat dari level terendah 1,6% pada tahun 2003 menjadi 13,9% pada tahun 2008. Tingkat kemiskinan meningkat menjadi 15%, dan pengangguran secara resmi sebesar 12%. Selain itu, tingginya jumlah pengungsi di Yordania membebani ekonomi dan menyebabkan pembatalan subsidi minyak dan gas yang telah memberikan transportasi murah dan

¹⁶ C.R. Ryan, "Jordanian Foreign Policy and the Arab Spring," *Middle East Policy* 21 (2014): 145.

bahan bakar pemanas rumah kepada warga Yordania selama musim dingin.¹⁷

Krisis ekonomi yang terjadi di Yordania pada akhirnya memicu gelombang protes massa. Tingginya angka pengangguran membuat warga kesulitan untuk bekerja. Hal ini diperparah dengan perilaku koruptif pejabat setempat di tengah kesulitan rakyat. Angka kemiskinan yang meningkat membuat desakan untuk perbaikan ekonomi dan reformasi politik semakin menguat. Kebijakan pengurangan pembatalan subsidi di beberapa sektor seperti minyak, transportasi dan lainnya merupakan langkah rasional yang diambil akibat tingginya beban ekonomi yang harus ditanggung. Namun hal itu tidak dipahami secara luas oleh masyarakat, hingga mereka tetap melakukan demonstrasi untuk reformasi ekonomi dan politik.

DEMONSTRASI PUBLIK DAN REFORMASI POLITIK

Pada bulan Januari 2013, pemilihan parlemen di Yordania diadakan dua tahun lebih awal. Raja Abdullah berjanji untuk berkonsultasi dengan parlemen mengenai pemilihan perdana menteri untuk pertama kalinya. Namun, partai-partai oposisi yang dipimpin oleh Front Aksi Islam memboikot pemilu tersebut. Mereka mengatakan perubahan undang-undang pemilu berarti sistem tersebut dicurangi untuk menguntungkan masyarakat adat pedesaan Badui yang mendominasi pemerintahan dan pasukan keamanan dibandingkan dengan mayoritas penduduk Palestina di kota-kota besar dan kecil. Pada bulan Maret 2013, Raja Abdullah menegaskan bahwa ia dapat memimpin transisi menuju demokrasi.

Strategi politik pemerintah Yordania tidak seperti negara-negara Arab lainnya, khususnya Libya, Mesir, dan Suriah, di mana rezim bentrok dengan pengunjuk rasa. Yordania terlibat dalam dialog dengan oposisi dan memenuhi beberapa tuntutan. Sekalipun tanggapan ini bersifat simbolis, masyarakat masih diperbolehkan untuk berdemonstrasi dan mengekspresikan dirinya secara bebas. Raja Abdullah memastikan bahwa demonstrasi berakhir dengan damai dan tidak ada yang terluka. Hal ini menjadi bukti bahwa sikap Yordania tidak seperti negara Arab lainnya,

¹⁷ Ronen Yitzhak, "Between reform and Islam: The Arab spring in Jordan 2011–2014," *Democracy and Security*, (2017): 6.

pemerintah telah memberikan kebebasan kepada warganya. Strategi ini juga mencegah calon pengunjuk rasa lainnya untuk memobilisasi barisan orang yang turun ke jalan seperti yang terjadi di negara lain. Pendekatan represif tentu bisa menghasut publik dan akhirnya memperbesar oposisi.¹⁸

Monarki otoriter di Timur Tengah telah menekankan empat faktor penjelas utama. Pertama, semua monarki Timur Tengah mendapat untung dari berbagai jenis dan tingkat dukungan eksternal. Kedua, banyak monarki memiliki akses ke sewa yang besar dan mampu mendistribusikannya secara efisien ke kelompok sasaran utama, sehingga membeli loyalitas politik. Ketiga, monarki Timur Tengah telah mengembangkan cara untuk memasukkan anggota keluarga atau elit inti dalam pengambilan keputusan politik. Kemudian keempat, monarki terus menggunakan klaim legitimasi tradisional, agama dan prosedural untuk membenarkan kekuasaan mereka vis à-vis bagian yang lebih luas dari populasi.¹⁹

Rezim Hashemite secara historis menjaga stabilitas dengan menggunakan strategi mengooptasi elit dengan membawa mereka ke dalam sistem pemerintahan. Perdana menteri dan pemerintah (semua pejabat kerajaan) dirombak secara berkala. Perombakan tersebut secara efektif mengatur ulang koalisi yang berkuasa, sehingga banyak yang merasa memiliki kepentingan yang besar dalam status quo. Kerajaan juga mengandalkan sumber bantuan ekonomi eksternal, serta hubungan perdagangan dan investasi dengan negaranegara kaya. Dengan demikian, hubungan luar negeri Yordania sama pentingnya dengan stabilitas domestik kerajaan seperti halnya dengan keamanan regional dan eksternalnya. Namun, ini tidak berarti bahwa para pembuat kebijakan tertinggi termasuk raja mengesampingkan gelombang demonstrasi. Sebaliknya, Raja Abdullah menekankan kedalaman reformasi di kerajaan. Pemerintah merespons dengan meluncurkan serangkaian reformasi politik dalam negeri, yaitu:²⁰

1. Mengubah konstitusi

¹⁸ Ronen Yitzhak, "Between reform and Islam," 15.

¹⁹ André Bank, Thomas Richter, and Anna Sunik, "Durable, Yet Different: Monarchies in the Arab Spring," *Journal of Arabian Studies: Arabia, the Gulf, and the Red Sea* 4, no. 2 (2014): 165

²⁰ C.R. Ryan, "Jordanian Foreign Policy and the Arab Spring," 145.

2. Membentuk mahkamah konstitusi
3. Merevisi undang-undang pemilu dan partai
4. Mengadakan putaran baru parlemen nasional dan pemilihan kota

Tanggapan pertama Raja Abdullah terhadap aksi unjuk rasa publik dan tuntutan oposisi adalah mengganti Perdana Menteri Samir Rifai dengan Maruf Bakhit. “The Jordan Times” melaporkan bahwa setelah bentrokan antara demonstran pro-pemerintah dan proreformasi di Amman, Bakhit menuduh para Islamis melakukan kekerasan. Surat kabar itu juga mengutip Raja Abdullah dalam tanggapan cepat untuk protes pada tanggal 30 Maret seperti yang menyatakan insiden ini tidak mewakili moral dan perilaku orang Yordania. Sebenarnya, protes tersebut bergabung dengan berbagai segmen masyarakat Yordania dan oposisi yang terdiri dari Front Aksi Islam, Hashed, Komunis Yordania, Baath Yordania, Baath Arab dan partai Persatuan Arab. Mereka mengorganisir protes di depan Kantor Perdana Menteri Yordania menyerukan pemecatan dan pengangkatan pejabat yang transparan.

Amandemen undang-undang pemilu Yordania merupakan elemen kunci dari demonstrasi publik setelah Musim Semi Arab. Undang-undang tersebut yang awalnya diubah pada tahun 1993 menggantikan sistem banyak suara dengan formula Single NonTransferable Vote (SNTV). Formula satu orang satu suara ini menjadi kontroversi di Yordania. Tidak hanya karena formula pemungutan suara yang didefinisikan ulang, tetapi juga karena hubungannya dengan realokasi kursi yang menguntungkan provinsi-provinsi wilayah selatan. Akibatnya, undang-undang pemilu mengizinkan penduduk asli Yordania (Badui) untuk mengirim lebih banyak perwakilan ke parlemen dengan mengorbankan kotakota di utara yang penduduknya didominasi oleh penduduk Yordania keturunan Palestina. Debat publik seputar undang-undang pemilu yang kontroversial di Yordania berlangsung ketat. Front Aksi Islam (IAF) memimpin oposisi untuk menyerukan amandemen undang-undang pemilu 1993, dan perdamaian tahun 1994 dengan Israel semakin memicu ketegangan antara rezim dan oposisi.

Pada tanggal 19 Juni 2013, parlemen Yordania mengesahkan undang-undang pemilihan baru dengan pemilihan baru yang direncanakan pada

akhir tahun ini. Terlepas dari persetujuan undang-undang tersebut, pemimpin IAF yakni Mansur menolaknya. Raja Abdullah menyerukan sesi khusus untuk membahas undang-undang pemilu yang baru di parlemen. Undang-undang baru menetapkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Yordania, anggota pasukan keamanan juga akan diizinkan untuk memberikan suara dalam pemilihan. Mengingat bahwa mayoritas pejabat keamanan direkrut dari penduduk Tepi Timur Yordania, perubahan undang-undang tersebut bersifat indikasi. Tentang fakta bahwa kerajaan masih berdiri di atas penopang kesukuan, secara historis rezim selalu memperoleh legitimasi politik dari suku Badui Tepi Timur. Kemudian anggota keamanan diharapkan mempertahankan kesetiaan mereka kepada monarki. Hal lain yang krusial adalah perubahan undang-undang yang mencadangkan proporsi kursi dari distrik Badui untuk kandidat perempuan yang akan membantu mengonsolidasikan legitimasi politiknya.²¹

Dalam uraian ini, Raja Abdullah sebagai pemimpin tertinggi di Yordania memberikan respons strategis terhadap peristiwa yang terjadi. Meskipun di tengah kondisi politik yang hangat karena perbedaan pandangan dengan kelompok-kelompok reformasi seperti IAF, Ikhwanul Muslimin, Hirak dan yang lainnya, pemerintah tetap bersedia membuka ruang komunikasi. Pada akhirnya untuk menjaga kondisi sosio-politik di Yordania, Raja Abdullah melakukan reformasi politik. Reformasi tersebut berupa perubahan konstitusi, kemudian membentuk badan hukum berupa mahkamah konstitusi, amandemen undang-undang pemilu dan partai, serta mengadakan putaran baru parlemen nasional dan pemilihan kota. Kebijakan ini terbukti efektif dalam meredam gejolak protes massa di Yordania yang terjadi pada kurun waktu 2011-2013.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Arab Spring yang terjadi di Yordania adalah fenomena demonstrasi massa yang menuntut reformasi politik. Fenomena ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, budaya koruptif, dan politik. Kondisi ekonomi yang tidak stabil di Yordania membuat tingginya angka

²¹ Nur Koprulu, "Consolidated monarchies in the post-‘Arab Spring’ era," 323.

pengangguran dan kurangnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini diperburuk oleh perilaku koruptif para elit yang tercium masyarakat. Menyikapi hal tersebut, massa yang bersumber dari berbagai elemen masyarakat seperti IAF, *Ikhwanul Muslimin*, Hirak dan lainnya bersama warga melakukan aksi protes. Adapun tuntutan mereka adalah reformasi politik. Merespons hal tersebut, Raja Abdullah selaku pemimpin Yordania bersedia untuk menuruti tuntutan tersebut. Raja memecat pejabat yang bermasalah, memperbaiki sistem konstitusi dan hukum, hingga mengamandemen undang-undang terkait proses pemilihan. Strategi tersebut efektif menurunkan tensi publik yang mulai memanas dalam melihat kondisi yang dialami Yordania. Akhirnya, Yordania menjadi salah satu negara di Timur Tengah yang terhindar dari jatuhnya kekuasaan yang terjadi pada masa *Arab Spring*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkhaleq Abdullah, "Repercussions of the Arab Spring on GCC States," Arab Center for Research & Policy Studies, 2012: 3.
- André Bank, Thomas Richter, and Anna Sunik, "Durable, Yet Different: Monarchies in the Arab Spring," *Journal of Arabian Studies: Arabia, the Gulf, and the Red Sea* 4, no. 2 (2014): 165
- BBC.com., Arab uprising: Country by country – Jordan, n.d. <https://www.bbc.com/news/world-12482679>.
- C.R. Ryan, "Jordanian Foreign Policy and the Arab Spring," 145.
- C.R. Ryan, "Jordanian Foreign Policy and the Arab Spring," *Middle East Policy* 21 (2014): 145.
- Curtis Ryan, "Resurgent Protests Confront New and Old Red Lines in Jordan," *Middle East Report* 292, no. 3 (2019).
- Erin Blakemore, What was the Arab Spring and how did it spread? n.d. <https://www.nationalgeographic.com/culture/article/arab-spring-cause>.
- Florence Gaub, "After The Spring: Reforming Arab Armies," *Strategic Studies Institute, US Army War College*, (2014): 1.

- Graeme P. Herd, "The Arab Spring: Challenges, Obstacles and Dilemmas," *Connections* 10, no. 4 (2011): 103.
- Jillian Schwedler, Jordan: The Quiescent Opposition, n.d. <https://www.wilsoncenter.org/article/jordan-thequiescent-opposition>
- Karim Merhej, "The Never-Ending Process of Political Reform in Jordan," 4 Mei 2022. <https://timep.org/2022/05/04/the-never-ending-process-of-political-reform-in-jordan/>.
- Karim Merhej, The Never-Ending Process.
- Lakshmi Priya, "Jordan and the Arab Uprisings: Rezim Survival and Politics Beyond the State," *Strategic Analysis*, (2019): 2
- Martin Beck, and Simone Huser, "Jordan and the 'Arab Spring': No Challenge, No Change?" *Middle East Critique* 24, no. 1 (2015): 83.
- Marty Harris, "Jordan's youth after the Arab Spring," *Lowy Institute for International Policy*, (2015): 3.
- Nur Koprulu, "Consolidated monarchies in the post-'Arab Spring' era: the case of Jordan," *Israel Affairs* 20, no. 3 (2014): 319.
- Nur Koprulu, "Consolidated monarchies in the post-'Arab Spring' era," 323.
- Ronen Yitzhak, "Between reform and Islam," 15.
- Ronen Yitzhak, "Between reform and Islam: The Arab spring in Jordan 2011–2014," *Democracy and Security*, (2017): 6.
- Zoltan Barany, "The 'Arab Spring' in the Kingdoms," *Arab Center for Research & Policy Studies*, (2012): 1.
- Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 79.